

ANALISIS DAMPAK PEMEKAR WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2023

Saimah Citra Lestari

Universitas Islam An Nur Lampung

Email: saimahcitralestari@gmail.com

Abstract

Regional expansion is one of the government's strategic policies aimed at bringing public services closer to the community and accelerating regional economic development. This study aims to analyze the impact of regional expansion on economic growth in West Lampung Regency in 2023 from the perspective of Islamic economics. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that the regional expansion in West Lampung has had a positive impact on improving access to public services, creating new employment opportunities, and fostering the development of local economic sectors such as agriculture, trade, and services. However, challenges remain in ensuring equitable development among the newly formed regions and addressing economic disparities among communities. From the perspective of Islamic economics, the success of regional expansion is not only measured by material economic growth but also by how well the policy reflects the principles of justice, public benefit (*maslahah*), and equitable welfare distribution. Therefore, a fair, participatory, and sharia-based regional governance system is needed to realize just and sustainable economic development.

Keywords: regional expansion, economic growth, Islamic economics, justice, West Lampung.

Abstrak

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mendekatkan pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pelayanan publik, terbukanya lapangan kerja baru, dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, serta jasa. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pemerataan pembangunan antar wilayah hasil pemekaran serta kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan pemekaran wilayah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi secara material, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola daerah yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemekaran wilayah, pertumbuhan ekonomi, ekonomi Islam, keadilan, Lampung Barat.

Pendahuluan

Pemekaran wilayah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan public (Wika, 2024). Di Indonesia, pemekaran wilayah menjadi fenomena yang terus berkembang sejak diberlakukannya otonomi daerah pada era reformasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri demi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional (Iskandar, 2020). Dalam konteks ini, pemekaran wilayah bukan sekadar upaya administratif, melainkan juga merupakan strategi pembangunan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami pemekaran wilayah dalam beberapa tahun terakhir. Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, memperkuat kelembagaan pemerintahan lokal, serta menggali potensi ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah yang sebelumnya belum tergarap secara optimal. Dalam praktiknya, pemekaran wilayah di Lampung Barat dilakukan dengan membentuk kecamatan atau kampung baru yang secara administratif memiliki struktur pemerintahan sendiri. Namun demikian, efektivitas dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu wilayah dalam mengelola potensi yang dimilikinya (Zahari, 2017). Dalam konteks pemekaran wilayah, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai dimensi seperti peningkatan pendapatan per kapita, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, serta meningkatnya investasi lokal (Syofya, 2017). Namun demikian, perlu dicermati bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif, melainkan juga harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan (Mudiarta, 2011). Tidak jarang pemekaran

wilayah justru melahirkan kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang transparan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi (Amsari et al., 2024). Konsep seperti *maslahah* (kemanfaatan umum), *'adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab) menjadi prinsip fundamental dalam menilai keberhasilan kebijakan publik, termasuk kebijakan pemekaran wilayah (Nurhajjah, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana kebijakan pemekaran wilayah di Lampung Barat mampu mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, baik dari aspek perencanaan, implementasi, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Di Kabupaten Lampung Barat, potensi ekonomi tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Pemekaran wilayah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut dengan memberikan ruang bagi pengembangan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berbasis pada potensi kearifan lokal. Misalnya, dengan pemekaran wilayah, daerah-daerah terpencil dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap infrastruktur dasar, pasar, dan layanan publik lainnya yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi rakyat. Namun, realisasi dari harapan ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah pasca-pemekaran.

Seiring dengan bertambahnya jumlah wilayah administratif baru, muncul pula tantangan dalam hal pembiayaan pembangunan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta kemampuan kelembagaan dalam merancang kebijakan yang berpihak pada rakyat (Hadi, 2015). Tidak jarang, pemekaran justru menimbulkan beban baru dalam bentuk biaya operasional pemerintahan yang tinggi dan duplikasi struktur birokrasi yang tidak efisien. Dalam kondisi demikian, pemekaran wilayah berisiko menjadi proyek politik semata tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap dampak pemekaran wilayah harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Penelitian ini menjadi penting mengingat minimnya kajian yang mengintegrasikan aspek ekonomi Islam dalam analisis kebijakan pemekaran wilayah. Padahal, dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti di Lampung Barat, pendekatan ekonomi Islam dapat

memberikan perspektif alternatif yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan kebijakan publik seperti pemekaran wilayah tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap nilai-nilai etis dan sosial yang dianut oleh masyarakat.

Selain itu, pemekaran wilayah juga perlu dilihat sebagai peluang strategis untuk memperkuat basis ekonomi umat melalui pengembangan sektor-sektor riil yang berbasis pada potensi lokal (REZKY, 2024). Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi hal yang utama, terutama dalam mencegah terjadinya eksploitasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok rentan (Taufik, 2015). Oleh karena itu, keberhasilan pemekaran wilayah harus diukur dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain yang tengah atau akan menjalankan kebijakan serupa, agar proses pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat yang maksimal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, maka penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Barat, terutama dari sisi ekonomi dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini tidak hanya akan mengukur keberhasilan dari sisi makro ekonomi, tetapi juga menelaah aspek sosial, budaya, dan etika dalam pembangunan wilayah pasca pemekaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kebijakan pemekaran wilayah dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan daerah yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023, khususnya dalam kerangka nilai-nilai ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dan ekonomi dari sudut pandang masyarakat yang mengalaminya secara langsung. Peneliti tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga menjelajahi makna di balik data tersebut melalui interaksi langsung di lapangan, guna memperoleh informasi yang kaya, otentik, dan kontekstual sesuai dengan realitas yang ada (Anggito & Setiawan, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di beberapa kecamatan hasil pemekaran di Lampung Barat untuk melihat secara langsung kondisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta dinamika sosial masyarakat setelah pemekaran wilayah dilakukan. Wawancara mendalam dilakukan kepada berbagai informan, seperti tokoh masyarakat, aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, serta warga biasa yang terdampak langsung oleh kebijakan pemekaran wilayah. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan pemerintah daerah, data statistik BPS, dokumen RPJMD, serta literatur-literatur yang relevan dengan topik pemekaran wilayah dan ekonomi Islam.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)** dengan cara mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, akses layanan publik, dampak sosial, serta kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *keadilan distributif*, *masalah*, dan *pemberdayaan*. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi, disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan diinterpretasikan secara kritis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta diskusi dengan pakar ekonomi dan akademisi Islam untuk memperoleh sudut pandang yang lebih objektif. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas dan dampak kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Barat, baik dari aspek ekonomi konvensional maupun nilai-nilai ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Akses Ekonomi dan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Barat secara umum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas ekonomi dan layanan publik. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terpencil dan sulit dijangkau kini lebih dekat secara administratif dengan pusat pemerintahan baru, sehingga proses distribusi anggaran dan pembangunan menjadi lebih merata. Akses jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan mulai mengalami peningkatan, serta berbagai program ekonomi kerakyatan lebih mudah dijalankan. Dengan adanya kecamatan atau pekon baru hasil pemekaran, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menyusun program-program pembangunan berbasis potensi lokal, sehingga terjadi efisiensi dalam pelayanan dan peningkatan daya saing antar wilayah.

Selain infrastruktur, aspek layanan sosial dan ekonomi seperti perizinan usaha, akses modal usaha kecil, dan bantuan sosial menjadi lebih mudah diakses. Hal ini memberikan dorongan bagi tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi motor penggerak utama ekonomi lokal. Banyak warga yang sebelumnya hanya bergantung pada sektor pertanian subsisten kini mulai membuka warung, usaha kerajinan, atau jasa lain yang sesuai dengan kebutuhan komunitas masing-masing. Efek domino dari peningkatan akses tersebut menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang lebih hidup dan dinamis, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan.

Namun demikian, tidak semua wilayah hasil pemekaran mengalami dampak yang sama. Beberapa daerah yang berada di wilayah pegunungan atau memiliki keterbatasan infrastruktur dasar masih belum merasakan manfaat pemekaran secara optimal. Masalah seperti distribusi anggaran yang tidak merata, lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, serta kurangnya tenaga aparatur menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan kecemburuan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang adil dan inklusif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya meningkatkan akses dan pelayanan publik harus selaras dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *keadilan distributif*. Artinya, pemekaran wilayah tidak boleh hanya memberikan manfaat pada kelompok tertentu, tetapi harus dirancang agar semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah tertinggal,

mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan. Prinsip '*adl*' (keadilan) dalam ekonomi Islam menuntut adanya pengelolaan sumber daya secara proporsional agar tercipta keseimbangan antara pusat dan daerah, serta antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, efektivitas pemekaran wilayah harus dinilai tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari sejauh mana ia mampu menghilangkan ketimpangan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah memberikan efek positif terhadap aksesibilitas layanan dan aktivitas ekonomi di banyak wilayah Kabupaten Lampung Barat. Namun, tantangan masih cukup besar dalam memastikan pemerataan pembangunan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik kebijakan lokal. Diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan lokal, alokasi anggaran yang berbasis keadilan sosial, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, agar dampak pemekaran wilayah benar-benar dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh warga.

Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Baru

Salah satu hal penting dalam analisis ini adalah sejauh mana pemekaran wilayah diintegrasikan dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik kebijakan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat, ditemukan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan kebijakan pembangunan masih bersifat sporadis dan belum terlembaga secara sistemik. Meskipun secara budaya masyarakat Lampung Barat cenderung religius, namun kebijakan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip seperti *amanah* (tanggung jawab publik), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* sebagai kerangka berpikir utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif keagamaan dengan realitas pelaksanaan kebijakan publik.

Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output material, tetapi juga dari proses dan etika pelaksanaannya. Setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas (prinsip *syura*), transparansi dalam pengelolaan dana (*amanah*), serta memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat jangka panjang (*maslahah*) (Huraerah, 2008). Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, pembangunan tidak hanya akan mempercepat

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemekaran wilayah adalah keterbatasan pemahaman aparat pemerintah dan pengambil kebijakan terhadap konsep ekonomi Islam secara komprehensif. Masih banyak yang menganggap nilai-nilai tersebut sebagai aspek moral semata, bukan sebagai sistem nilai yang dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan dari kalangan akademisi maupun lembaga keagamaan agar perspektif ekonomi Islam dapat dijadikan kerangka dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih bermoral dan adil.

Meskipun masih ada tantangan, beberapa wilayah hasil pemekaran mulai menunjukkan inisiatif dalam menerapkan pendekatan Islam dalam pembangunan, seperti melalui program zakat produktif, koperasi syariah, dan kegiatan pelatihan kewirausahaan berbasis nilai-nilai etis. Inisiatif-inisiatif ini dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mengembangkan strategi pembangunan yang berakar pada nilai budaya dan agama masyarakat setempat. Namun, inisiatif tersebut harus didukung dengan kebijakan daerah yang responsif dan sistem pengawasan yang kuat agar tidak hanya menjadi program simbolik, tetapi benar-benar berdampak pada transformasi ekonomi dan sosial.

Secara keseluruhan, pengintegrasian ekonomi Islam dalam pembangunan wilayah hasil pemekaran di Lampung Barat masih bersifat parsial dan memerlukan dorongan dari berbagai pihak agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dalam jangka panjang, hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membentuk sistem sosial yang berkelanjutan dan adil. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan, maka pemekaran wilayah tidak hanya menjadi instrumen administratif semata, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pembangunan yang penuh keberkahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan akses terhadap pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pemekaran wilayah mempermudah distribusi anggaran pembangunan dan mempercepat pelayanan administratif, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa dan wilayah pinggiran. Namun demikian, dampak positif ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah hasil pemekaran, masih ditemukan ketimpangan dalam kualitas layanan dan pembangunan antar wilayah. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan pemekaran wilayah harus dinilai tidak hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi material, tetapi juga dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu mewujudkan prinsip-prinsip keadilan distributif, partisipasi masyarakat (*syura*), transparansi (*amanah*), dan kemaslahatan bersama. Sayangnya, integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pemekaran wilayah masih tergolong lemah dan belum menjadi pijakan sistematis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pendidikan ekonomi Islam bagi pengambil kebijakan, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat agar pemekaran wilayah benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hadi, D. P. (2015). Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal dalam rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1).
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Mudiarta, K. G. (2011). Perspektif dan peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(1), 55–66.
- Nurhajjah, N. (2024). *Pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana sebagai variabel moderating*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- REZKY, R. (2024). *STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI PERTANIAN, PETERNAKAN & PERKEBUNAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Syofya, H. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Dalam Penguatan Daya Saing Kota Sungai Penuh. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2), 97–114.
- Taufik, T. (2015). Kemiskinan, Perempuan Dan Agama. *Kalam*, 9(1), 145–164.
- Wika, M. (2024). PEMEKARAN DAERAH DAN STABILITAS POLITIK: ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DI MERAUKE. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8259–8271.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180–196.